BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 (2010:1) adalah: "Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah". Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Menurut Indra Bastian (2010:137) "Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningktakan kualitas laporan pemerintah di Indonesia."

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia.

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1.1 Prosedur Penerapan SAP

Prosedur dalam penerapan SAP di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1.) Menerima sosialisasi tentang SAP dari pemerintah Kota Bandung.
2.) Disosialisasikannya aplikasi SIMDA keuangan.
3.) Diberikannya pelatihan dan bimbingan teknis kepada seluruh staf keuangan di Kota Bandung.
4.) Diterapkannya SAP di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.

3.2.1.2 Hambatan Dalam Penerapan Sap

Adapun hambatan dalam penerapan SAP yang ditemukan di tempat kerja praktek adalah sumber daya manusia yang ditempatkan di bidang akuntansi bukanlah lulusan sarjana ekonomi akuntansi sehingga terdapat kekurangan pemahaman dalam penerapan SAP. Hal ini dapet mempengaruhi kinerja atau hasil dari kinerja tersebut menjadi kurang maksimal atau kurang sesuai dengan yang diharpkan.

3.2.1.3 Upaya Dalam Penerapan Sap

Upaya yang dilakukan dari instansi tersebut adalah :

1. Dengan mengirimkan staf akuntansi tersebut dalam diklat, seminar dan pengarahan pengarahan yang diadakan oleh pemerintah agar kedepannya lebih memahami tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan dikirmkannya staf tersebut diaharpkan akan meningkatkan kualitas kinerja sehingga kendala-kendala dalam penerapan SAP dapat di minimalisir atau bahkan dapat teratasi.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur Penggunaan Aplikasi Simda

SIMDA keuangan adalah aplikasi yang dibuat BPKP untuk mempermudah pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan

akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Adapun prosedur dari penggunaan aplikasi ini yaitu :

1.) Pengeluaran : Klik Data Entry – pilih SKPD – pilih Bendahara – lalu Pengeluaran. Sub menu ini digunakan oleh fungsi bedahara SKPD untuk pengadministrasian pembuatan SPP, Pengeluaran dan Penerimaan, pembuatan SPJ dan pengesahan SPJ serta penerimaan dan penyetoran pajak yang dilampiri dokumen pendukungnya dari SKPD.
2.) Penerimaan : Klik Data Entry – pilih SKPD – pilih Bendahara – lalu Penerimaan. Sub menu ini digunakan oleh fungsi bedahara SKPD untuk pengadministrasian pembuatan Bukti Penerimaan, Surat Tanda Setoran (STS) dan ekspor impor data bukti penerimaan STS.
3.) Ekspor Data SPM dan Impor Data SPD/SP2D : Klik Data Entry – pilih SKPD – pilih Tata Usaha– lalu Ekspordata – dan SPM. Untuk SPD/SP2D : Klik Data Entry – pilih SKPD – pilih Tata Usaha– lalu Impordata – dan pilih SPD/SP2d.
4.) Verifikasi SPP/Pembuatan SPM/Pengesahan SPJ : Klik Data Entry – pilih SKPD – pilih Tata Usaha– lalu pilih antara Verifikasi SPP/Pembuatan SPM/Pengesahan SPJ.
5.) Laporan Bendahara : Klik Laporan – pilih SKPD – Lalu Bendahara – dan pilih Penerimaan/Pengeluaran.
6.) Tata Usaha : Klik Laporan – pilih SKPD – Lalu Tata Usaha.

3.2.2.2 Hambatan

Hambatan yang terjadi dilapangan kerja praktek penerapan SAP dalam penggunaan SIMDA keuangan adalah :

1.) Terbatasnya sumber daya manusia yang ditunjuk sebagai operator SIMDA keuangan.
2.) Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengoprasian SIMDA keuangan.
3.) Aplikasi SIMDA keuangan yang belum terintegrasi secara *online* menyeluruh.

3.2.2.3 Upaya

Upaya yang dilakukan dari instansi tersebut adalah :

1.) Dengan mengirimkan staf akuntansi/bendahara atau operator SIMDA keuagan tersebut dalam sosialisasi, diklat, seminar dan pengarahan pengarahan yang diadakan oleh pemerintah tentang pengoprasian SIMDA keuangan agar kedepannya lebih memahami tentang aplikasi tersebut agar mencapai tujuan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yaitu Laporan Keuangan Pemerintah yang berkualitas.
2.) Mengikutsertakan lebih banyak staf kantor dalam diklat, seminar dan pengarahan tentang SIMDA keuangan.
3.) Mengajukan permohonan agar SIMDA terintegrasi secara *online* karena baru sebagian SKPD saja yang sudah bisa mengakses fitur *online.*